

BAB II
VISI, MISI, STRATEGI,
DAN KEBIJAKSANAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DI AKHIR REPELITA VI DAN MENGHADAPI REPELITA VII

Pembangunan sektor industri dan perdagangan selama 30 tahun terakhir bersama sektor-sektor lainnya telah berlangsung dalam upaya menciptakan struktur ekonomi nasional yang makin kukuh dan seimbang, di mana struktur ekonomi secara bertahap telah bergeser dari titik berat pertanian ke titik berat industri. Pembangunan industri dan perdagangan pada Repelita VI, sampai dengan pertengahan tahun 1997, pada umumnya menunjukkan perkembangan yang mantap sehingga mampu mewujudkan berbagai kekuatan dunia usaha dalam perekonomian nasional. Namun pembangunan industri dan perdagangan, sejak pertengahan tahun 1997 telah dipengaruhi oleh timbulnya krisis moneter sehingga diperlukan langkah penyesuaian untuk mengatasi kelemahan tertentu, yang apabila tidak dilakukan, akan menjadi kendala pembangunan berikutnya.

Pembangunan industri dan perdagangan untuk masa selanjutnya sangat dipengaruhi kecenderungan globalisasi yang berdampak makin bebasnya perdagangan dunia. Hal ini bermakna bahwa dengan terbentuknya organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization* – WTO) dan peraturan multilateral yang diberlakukannya, maka manusia, barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi, yang menjadi faktor-faktor penentu dalam pembangunan industri dan perdagangan, dapat berpindah tanpa hambatan dari bagian dunia yang satu ke bagian dunia lainnya. Perkembangan ini mengakibatkan makin menyatunya pasar domestik ke dalam pasar dunia sehingga berdampak kembar, yaitu membuka peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan industri dan perdagangan.

Terjadinya krisis moneter di negara Asia Timur sejak pertengahan tahun 1997, yang di Indonesia telah berkembang menjadi krisis ekonomi, mengakibatkan berbagai dampak negatif yang sangat merugikan pembangunan, terutama dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi negatif dan melonjaknya inflasi pada tahun terakhir Repelita VI atau tahun anggaran 1998/1999. Perubahan nilai tukar mata uang di dunia, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara, telah mengakibatkan berubahnya peta keunggulan komparatif dan kompetitif antarindustri atau antarnegara. Keadaan seperti ini perlu disiasati terutama untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sektor industri dan perdagangan

Indonesia. Semakin cepat Indonesia dapat menemukan dan mendayagunakan kekuatan, dan mengatasi kelemahan tersebut, maka semakin cepat pula harapan untuk keluar dari krisis ekonomi.

Secara garis besar kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mewarnai pembangunan industri dan perdagangan Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan industri telah dapat memperkuat struktur perekonomian nasional dengan berkembangnya keterkaitan dan daya dukung antarsektor, mendorong kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya. Industri nasional telah meningkat kemampuannya dalam rancang bangun, perekayasaan, dan konstruksi, serta memanfaatkan barang dan jasa dalam negeri. Mata rantai industri juga telah dapat diwujudkan dengan ditandai terbangunnya industri-industri hulu hingga hilir, industri penunjang, termasuk industri hulu pengolah sumber daya alam seperti industri petro-kimia, yang sangat menghemat devisa. Di sisi lain, daya saing ekspor barang serta pencapaian nilai tambahnya telah makin meningkat meski dibanding para pesaingnya di Asia Timur, daya saing produk Indonesia harus lebih dipacu lagi. Dalam pada itu sisi kelemahan yang nampak antara lain, kandungan lokal beberapa produk barang dan jasa relatif rendah atau terdapat ketergantungan bahan baku impor yang relatif tinggi, serta penyebaran industri ke seluruh wilayah, terutama kawasan timur Indonesia yang belum merata.
2. Pembangunan perdagangan telah dapat mengembangkan sistem perdagangan nasional yang efektif, memanfaatkan peluang dan memperluas pasar melalui mekanisme pasar terkelola serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Mata rantai perdagangan juga telah dapat diwujudkan makin lengkap yang, antara lain, ditandai dengan makin berkembangnya perdagangan antardaerah, dirintisnya pasar berjangka komoditi, berkembangnya sistem waralaba, dibangunnya pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Namun di sisi lain pula, pembangunan perdagangan belum sepenuhnya didukung oleh sistem distribusi nasional yang efisien serta memberi akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
3. Dalam pembentukan PDB, pada tahun 1997 peranan industri pengolahan telah mencapai lebih dari seperempat dan peranan perdagangan (termasuk hotel dan restoran) telah mencapai sekitar seperenamnya. Dengan demikian maka kedua sektor tersebut telah menyumbang sekitar dua per lima dalam

pembentukan PDB. Demikian pula peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, dalam perolehan devisa, dan dalam peningkatan investasi selama Repelita VI ini telah berjalan dengan mantap. Di sisi lain, sasaran ekspor masih belum memuaskan dan strukturnya juga masih lebih bertumpu kepada keunggulan komparatif, seperti industri pengolah sumber daya alam dan industri padat karya yang kandungan teknologi dan ketrampilan sumber daya manusianya relatif kurang tinggi seperti industri kayu lapis dan industri pakaian jadi. Kinerja ekspor belum digerakkan oleh keunggulan kompetitif yang berlandaskan pada penguasaan teknologi dan ketrampilan sumber daya manusia. Demikian pula peranan industri dan perdagangan berskala kecil dan menengah dibanding dengan yang berskala besar serta peranan koperasi dibanding swasta dan BUMN, secara struktural masih sangat perlu ditingkatkan.

4. Dengan makin menyatunya pasar domestik ke dalam pasar global, maka pembangunan industri dan perdagangan dihadapkan kepada persaingan yang makin tajam di dalam negeri. Dengan terbentuknya WTO dan dicanangkannya liberalisasi perdagangan dalam kerangka kerjasama APEC pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, serta skema CEPT dalam rangka AFTA pada tahun 2003, maka gerak perdagangan akan semakin dinamis dan cepat sehingga dituntut daya saing yang tinggi. Untuk mengantisipasinya, sejak awal dekade yang lalu pembangunan industri dan perdagangan telah didukung oleh program deregulasi dan debirokratisasi yang tujuan pokoknya adalah meningkatkan efisiensi perekonomian nasional menuju terwujudnya daya saing yang tinggi.
5. Pada dimensi lain, makin bebasnya perdagangan dunia juga memunculkan kecenderungan meningkatnya kasus sengketa perdagangan. Kasus yang banyak dipersengketakan adalah masalah pembatasan impor, pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), subsidi, dumping, diskriminasi pasar domestik dan standar teknis. Kasus-kasus yang dikaitkan dengan penerapan ketentuan dan peraturan WTO tersebut cenderung menjadi alat proteksi pada negara-negara tertentu, terutama negara-negara maju, yang juga menggunakan kebijakan unilateral dan praktek-praktek perdagangan yang bersifat anti-persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Dengan alasan ini perdagangan sering dikaitkan dengan masalah lain, seperti: Hak-hak Pekerja, Lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan *counterveiling duties* dan *anti-dumping*, dan

perlakuan Sistem Preferensi Umum (*Generalized System of Preference - GSP*) yang menyimpang dari tujuan, sehingga ekspor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat dirugikan.

6. Dengan terjadinya krisis moneter berikut segala dampaknya maka pembangunan industri dan perdagangan dihadapkan pada ancaman yang lebih serius berupa krisis kepercayaan dari dunia usaha dan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tercermin dengan terjadinya aksi memborong bahan kebutuhan pokok jauh melebihi kebutuhan normal oleh masyarakat dan ditolaknya *Letter of Credit* (L/C) oleh negara-negara mitra dagang. Keadaan ini terjadi pada saat ketergantungan impor relatif tinggi dan nilai tukar masih berfluktuasi pada tingkat yang jauh di atas normal, sehingga akibatnya secara langsung dirasakan sebagai ancaman kelangsungan pembangunan industri dan perdagangan. Jelas sekali bahwa terhambatnya impor pada kelompok industri tertentu berarti terhambatnya produksi barang ekspor serta pasokan kebutuhan dalam negeri. Hal ini bergulir pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berarti pula menurunnya daya beli masyarakat. Sementara itu keuntungan dari ekspor yang dapat dipetik karena depresiasi nilai tukar rupiah, terutama bagi produk berkandungan lokal tinggi, juga mendapatkan kendala berupa langkanya peti kemas untuk ekspor dan keterbatasan devisa untuk impor bahan baku. Hal-hal seperti ini, antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sehingga secara keseluruhan berdampak sangat merugikan.
7. Perilaku industri di sisi lain, menunjukkan daya responsif yang lambat dalam menghadapi tantangan pasar global, antara lain terefleksi pada belum sepenuhnya dikuasai strategi menyeluruh terhadap siklus industri dari litbang hingga pemasaran dan kurang terakselerasinya keterkaitan antarindustri untuk menjadi agenda strategis dunia usaha nasional; masih lemahnya penguasaan dunia usaha terhadap aturan main perdagangan internasional, termasuk menyangkut standar produk-produk industri, paten industri dan HAKI, serta keterkaitan industri dengan pelestarian lingkungan; masih lemahnya pengembangan kualitas SDM bertaraf profesional, produktif, beretika bisnis, berbudaya industri, yang dikembangkan melalui sistem pengembangan SDM industrial secara masif dan

terpadu, guna mengisi kebutuhan-kebutuhan di bidang produksi, distribusi dan pemasaran; penguasaan teknologi industri yang relatif tergantung dari proses alih-teknologi serta belum bersumber pada kegiatan-kegiatan litbang dan inovasi produktif; masih tampaknya penguasaan industri secara individual mulai dari industri hulu hingga industri hilir yang bersifat antikompetisi; menggejalanya perilaku ekonomi biaya tinggi yang cenderung mendominasi praktek bisnis sehingga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.

8. Satu hal yang juga dipandang strategis adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk mencapai tingkat efisiensi usaha yang tinggi, sehingga antara lain berpengaruh terhadap fluktuasi harga, kegiatan produksi dan pasar, kecepatan arus distribusi, realokasi sumber-sumber industri, hingga ke penyusunan undang-undang pro-kompetisi.

Oleh karena itu, tantangan pembangunan industri dan perdagangan yang amat perlu dicermati adalah antara lain: (a) tantangan **ke arah** konsolidasi total *Indonesia Incorporated* atau dengan kata lain peningkatan kerja sama Pemerintah dengan DPR dan masyarakat luas, serta dunia usaha, meliputi dimensi multisektor yang lebih terintegrasi menghadapi persaingan industri, perdagangan, dan investasi milenium ketiga yang kian sengit dan kompleks; (b) tantangan **ke arah** pengamanan jalur distribusi dalam negeri maupun jalur distribusi luar negeri agar penyediaan dan penyaluran barang kebutuhan masyarakat serta pencapaian devisa ekspor sebesar-besarnya dapat terpenuhi; (c) tantangan **ke arah** pengembangan dunia usaha dan SDM industrial bertaraf profesional, produktif, memiliki etika dan moral bisnis, berbudaya industri, yang dikembangkan secara masif dan terpadu guna memperkuat produksi, distribusi dan pemasaran; (d) tantangan **ke arah** penguasaan teknologi melalui aktivitas litbang industri dan penciptaan iklim inovatif; (e) tantangan **ke arah** pencapaian keterpaduan lintas sektor yang efektif; (f) tantangan **ke arah** transparansi sektor industri dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian sesuai prinsip ekonomi Pancasila; (g) tantangan **ke arah** agresivitas ekspor; (h) tantangan **ke arah** penumbuhan kepercayaan masyarakat serta kecintaan masyarakat terhadap kemampuan produksi dan hasil produksi dalam negeri; serta (i) tantangan **ke arah** peningkatan diplomasi industri dan perdagangan di fora internasional sesuai konsistensi pelaksanaan program reformasi ekonomi di bidang industri dan

perdagangan. Dalam kaitan ini, sebagai modal dasar strategis bagi segenap pelaku perekonomian, khususnya di sektor industri dan perdagangan adalah, tekad pemerintah untuk menerapkan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi sebagaimana telah disepakati dengan IMF, dan didukung kuat oleh Bank Dunia serta *Asian Development Bank* (ADB), secara tuntas, transparan, terbuka dan non-diskriminatif. Pemerintah telah pula menyatakan komitmennya yang tinggi untuk meneruskan program deregulasi dan debirokratisasi agar lebih mengefisienkan jalannya roda perekonomian.

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri dan Perdagangan

1. **Visi** pembangunan industri dan perdagangan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai **negara industri baru sekaligus bangsa niaga yang tangguh**, pada akhir PJP-II. Sebagai negara industri baru telah terwujud sektor industri yang kuat dan maju, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya manusia industrial yang berkualitas serta makin mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tinggi. Sebagai bangsa niaga yang tangguh, mampu bersaing secara andal di pasar dalam dan luar negeri, di mana perekonomian nasional makin berorientasi kepada pasar global dan sekaligus menjadi bagian darinya.
2. Visi dimaksud diwujudkan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, di mana industrialisasi menjadi alur pokok dalam pembangunan ekonomi yang bersumberkan Pancasila dan UUD 1945. Gambaran era industri yang ingin dicapai di masa depan ditandai makin berkembangnya keaneka-ragaman industri di seluruh wilayah Indonesia, makin mantap dan menguatnya produksi, distribusi, dan konsumsi serta diversifikasi usaha pertanian dengan agroindustri dan agrobisnis, terwujudnya kemantapan jalinan industri dan perdagangan kecil serta menengah yang terintegrasi dengan koperasi, makin menguatnya penguasaan pasar dalam negeri serta meluasnya pasar luar negeri, bersamaan dengan pembangunan sektor lainnya yang mengangkat kualitas dan kemandirian sumber daya manusia.
3. Misi sektor industri dan perdagangan di dalam proses industrialisasi adalah sebagai penggerak utama di bidang produksi dan distribusi nasional, sebagai penghasil devisa bagi pembangunan, serta sebagai komponen kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Strategi dan Kebijakan Operasional

Strategi pembangunan industri dan perdagangan, pada hakikatnya merupakan strategi industrialisasi yang bersifat multi-dimensional dan lintas sektoral/regional, dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kedua sektor ini sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. **Persatuan dan kesatuan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka *Indonesia Incorporated*.** Strategi ini mengupayakan keserasian peran dalam pembangunan antara Pemerintah, DPR dan masyarakat luas, serta dunia usaha. Pembangunan industri dan perdagangan menempatkan dunia usaha dan masyarakat sebagai pelaku utamanya sedangkan pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dan fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan secara serasi, seimbang dan berkeadilan. Kebijakan pemerintah mencakup penetapan arah pembangunan dan penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing guna memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan industri dan perdagangan. Sedangkan fasilitasi yang diberikan pemerintah mencakup dukungan bagi dunia usaha dan masyarakat yang relatif kurang mampu bersaing untuk melindungi kepentingannya, baik sebagai produsen maupun konsumen. Oleh karena itu suksesnya strategi dimaksud memerlukan peningkatan efisiensi, produktivitas, profesionalisme, dan peranserta seluruh pelaku industri dan perdagangan, yang didorong oleh terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. **Peningkatan peran industri dan pedagang kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka makin berdayanya perekonomian rakyat.** Strategi ini mengupayakan penataan struktur industri dan perdagangan, mendorong pembangunan industri dan perdagangan yang menempatkan usaha besar, menengah, dan kecil serta BUMN, swasta, dan koperasi sebagai dunia usaha yang perlu mendapatkan pengaturan, pembinaan dan pengembangan ke arah struktur yang lebih seimbang. Dalam kaitan ini perlu disadari bahwa pembangunan adalah untuk seluruh rakyat, sehingga pengembangan kelembagaan dalam pembangunan industri dan

perdagangan perlu diarahkan menuju makin berdayanya ekonomi rakyat. Sejalan dengan hal ini peranan dunia usaha dan masyarakat, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen, juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih seimbang. Di dalam era perdagangan yang makin bebas, di mana instrumen proteksi makin terbatas, maka kesadaran konsumen untuk mengutamakan produksi dalam negeri menjadi sangat penting. Di lain pihak, keberadaan masyarakat sebagai konsumen juga perlu lebih diberdayakan dan dilindungi kepentingannya. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan terwujudnya mekanisme pasar yang terkelola, di mana persaingan usaha yang sehat dapat dijamin namun usaha kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas dapat lebih diberdayakan.

3. **Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka memenangkan persaingan global.** Strategi ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan perolehan devisa yang optimal dengan bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, dengan menempatkan keunggulan komparatif sumber daya alam, terutama yang terbarukan seperti pada agroindustri dan agrobisnis sebagai *leading-sector*, yang didukung oleh industri-industri penunjangnya, serta terus menerus mengembangkan keunggulan kompetitif untuk memenangkan kompetisi global. Berdasarkan prinsip ini, dan dengan menyadari keterbatasan sumber daya untuk melaksanakannya maka perlu ditentukan industri-industri prioritas penghasil produk-produk unggulan nasional maupun produk-produk andalan daerah yang perlu ditumbuh-kembangkan. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan pendekatan prioritas atau *priority-approach* dalam rangka mempertahankan produk-produk unggulan dan yang berpotensi untuk dirancang sebagai unggulan (yaitu produk industri yang telah berperan besar atau dirancang untuk berperan besar dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan perolehan devisa dan penggerak ekonomi daerah) yang berbasiskan potensi seluruh wilayah tanah air.
4. **Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian.** Strategi ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan dunia usaha maupun kebutuhan masyarakat, dengan meningkatkan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam

negeri seoptimal mungkin, dalam rangka penghematan devisa, mengurangi ketergantungan kepada luar negeri, menyehatkan neraca pembayaran dan mendorong kemandirian. Krisis ekonomi akhir-akhir ini mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang kurang berakar pada potensi bangsa sendiri ternyata sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia. Program Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi dan Keuangan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah, di samping diharapkan akan menghasilkan pemulihan kegiatan ekonomi, diharapkan pula akan mendorong terbukanya cakrawala dan ekspansi usaha baru pada perekonomian nasional. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan antara lain prakarsa dunia usaha dan masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gerakan nasional “Aku Cinta Produk Indonesia”, di mana pemerintah memberikan fasilitasnya.

5. **Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi yang berlangsung dalam era perdagangan bebas.** Strategi ini mengupayakan terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui proses industrialisasi, yang berlangsung di dalam era perdagangan bebas yang mempunyai rambu-rambu multilateral yang harus dihormati. Tanpa persiapan kelembagaan industri dan perdagangan, bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi dapat dipastikan akan lebih banyak menjadi pihak yang dirugikan. Persiapan dimaksud bersifat multidimensi yang melintasi semua sektor, tanpa diwarnai oleh arogansi sektoral dan regional. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan diteruskannya, dilanjutkannya, dan diperbaharainya deregulasi dan debirokratisasi melalui reformasi dan restrukturisasi dalam rangka menciptakan kelembagaan yang efisien, produktif, profesional, dan berdaya saing dalam pembangunan industri dan perdagangan.
6. **Pengembangan intensif sumber daya manusia (SDM) sektor industri dan perdagangan melalui akselerasi transformasi teknologi.** Strategi ini ditujukan untuk membuka peluang dan mengamankan posisi ketenagakerjaan industri berkualitas tinggi di abad mendatang bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara intensifikasi penguasaan dan ketrampilan teknologi industri. Termasuk di antaranya adalah mempercepat alih teknologi melalui investasi langsung luar negeri

(*foreign direct investment*) dengan konsesi atau lisensi, pengembangan dan adaptasi teknologi secara kreatif dan inovatif serta independen, penyediaan jenis teknologi siap produksi untuk industri kecil dan menengah, penggunaan teknologi perdagangan eceran dan distribusi yang produktif, perlindungan hak milik intelektual pada teknologi industri, penyempurnaan integrasi sistem pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama antarindustri dengan kalangan akademis dan pemerintah, perbaikan produktifitas pelatihan kejuruan, peningkatan semangat kreatifitas bisnis dan elan kewirausahaan, peningkatan wawasan dan ketrampilan produksi serta pemasaran secara integratif. Secara simultan pula, upaya-upaya penguasaan teknologi kunci di sektor industri (*critical technologies*) menjadi bagian dari strategi ini. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan komitmen dan konsistensi sikap yang dalam dan luas, terutama bagi pemerintah dan dunia usaha agar tercapai proses industrialisasi yang berintikan pada kemampuan SDM yang merata dan piawai dalam memanfaatkan teknologi industri yang tersedia.

- 7. Pengembangan dan penguatan sumber daya informasi untuk mendorong kemajuan sektor industri dan perdagangan.** Pada era masyarakat informasi yang mendunia saat ini, faktor daya saing dipengaruhi kuat oleh kemantapan sistem informasi yang mendukung perekonomian. Sistem informasi yang efektif akan meningkatkan nilai ekonomis dan nilai tambah industri serta perdagangan, menjamin peningkatan produktifitas dalam jangka panjang. Harga informasi harus terbentuk semurah-murahnya agar dapat didayagunakan oleh masyarakat luas, sedangkan arus informasi berlangsung lancar dan cepat ke arah semua jenjang industri dan perdagangan. Diharapkan strategi ini akan mengeliminasi disparitas informasi di dalam lingkungan dunia usaha nasional dan selanjutnya seluruh skala usaha nasional dapat menerima informasi secara simetris atau seimbang, sehingga mendorong revitalisasi perekonomian. Diharapkan pula strategi ini akan memberi kontribusi pada penghapusan struktur ekonomi biaya tinggi dan mampu mengoptimumkan produksi. Selanjutnya transparansi informasi diharapkan terkelola secara aktual, modern, integratif, dengan memanfaatkan sistem jaringan, yang mendistribusikan jenis-jenis informasi pasar, produksi, investasi, bahan baku, teknologi dan tenaga kerja industri, pembiayaan dan permodalan, serta produk-produk hukum

sektoral, termasuk kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber informasi produktif termasuk hasil-hasil intelegen industri. Perdagangan internasional yang memanfaatkan sarana *electronic data interchange* dan komunitas ruang *cyber* melalui *homepage Internet* akan terus dikembangkan dan difasilitasi, terutama ditujukan untuk peningkatan produktifitas usaha kecil dan menengah nasional. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan pengerahan semua sumber daya informasi industri dan pembentukan jaringan komunikasi sistematis untuk menopang dinamika sektor industri dan perdagangan.

Strategi pembangunan industri dan perdagangan nasional tersebut dalam penjabaran kebijakan operasionalnya serta pelaksanaan program-programnya, senantiasa perlu memperhatikan:

1. Perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang mantap dan seimbang antara wilayah industri hulu dan hilir, antara daerah yang satu dengan yang lain, antara industri besar dan menengah serta kecil, serta antara sektor industri dan perdagangan dengan sektor lainnya;
2. Perkembangan aktual dunia usaha di mana berlangsung peningkatan kebutuhan masyarakat dan peningkatan harga bahan pokok serta beberapa barang dan jasa lainnya;
3. Investasi industri dan perdagangan yang menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif di bidang pengolahan sumber daya alam, pengembangan SDM dan alih teknologi;
4. Transformasi budaya agraris tradisional ke arah budaya industrial modern, yang ditandai oleh penciptaan nilai tambah yang makin tinggi, etos kerja, disiplin dan profesionalisme;
5. Arus dan pasokan dana industri serta diversifikasi sumber-sumber keuangan, terutama yang berkenaan dengan pengembangan skala usaha kecil dan menengah;
6. Pembentukan keuntungan (*profit and returns*) perusahaan nasional dan pertumbuhan usaha jangka panjang yang meniadakan kesenjangan ekonomi;
7. Kemampuan operatif, akuisitif, suportif, maupun inovatif dalam memanfaatkan teknologi industri nasional, serta terus terlibat dalam

perkembangan teknologi baru dan teknologi kunci yang meningkatkan daya saing industri seperti *automation and computer-aided design (CAD) and manufacturing (CAM)*, teknologi telekomunikasi dan informasi, bioteknologi dan teknologi material baru.

C. Kebijakan Operasional Pembangunan Industri dan Perdagangan

1. Kebijakan Operasional Bersifat Umum

a. Sektor Industri

- 1) Mengembangkan industri yang efisien dan berwawasan ke masa depan, dengan kualitas produknya yang semakin baik dan bernilai tambah tinggi, sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Kebijakan operasional ini antara lain mencakup dan menyentuh:
 - a) Penciptaan iklim persaingan sehat yang dapat menjamin dan memelihara keseimbangan antara industri besar, menengah, dan kecil;
 - b) Pengembangan dan pemberdayaan industri dan perdagangan kecil serta menengah yang memiliki daya tahan lebih baik dan lebih fleksibel terhadap gejolak ekonomi, sebagai salah satu sumber penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
 - c) Kebijakan minimasi harga melalui pengupayaan biaya produksi yang rendah atau *marginal costing*, sejajar dengan percepatan dan kelayakan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi;
- 2) Kebijakan operasional pembangunan industri ditujukan untuk mengoptimalkan struktur industri serta organisasi industri nasional dan menggunakan pendekatan *total factor productivity (TFP)*, yaitu memaksimalkan sinergi dari semua faktor produksi secara simultan.
- 3) Kebijakan pemulihan kegiatan industri atau revitalisasi industri, akan memusatkan upaya untuk memperlancar arus pengadaan

bahan baku, dan mengembangkan peluang-peluang baru untuk memperbaiki kondisi perusahaan-perusahaan industri.

- 4) Kebijakan percepatan restrukturisasi industri, akan menciptakan iklim pengembangan agroindustri, industri kimia, industri elektronik, industri komponen dan barang penolong.
- 5) Kebijakan pengembangan industri yang menghasilkan produk unggulan nasional dan produk andalan daerah yang berakar di bumi Indonesia.
- 6) Melanjutkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sektor industri termasuk yang menyentuh investasi industri, serta terus mempertahankan kinerja industri nasional terbaik, termasuk industri-industri yang bertahan dalam krisis.
- 7) Mengembangkan sarana penyebaran informasi industri seluas-luasnya yang menjamin setiap pelaku industri nasional mendapatkan informasi secara simetris atau seimbang, cepat, aktual, dan murah.

b. Sektor Perdagangan :

- 1) Mengembangkan pasar domestik sebagai basis dan pendorong proses industrialisasi yang berkelanjutan serta mengembangkan pemasaran produk domestik agar semakin mampu bersaing baik di pasar domestik ataupun pasar global.
- 2) Kebijakan operasional pembangunan perdagangan dalam negeri adalah untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa dengan memantapkan pengadaan dan penyaluran antardaerah maupun antarpulau pada tingkat harga yang wajar, memperluas hasil-hasil produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen, mendorong dan membantu perdagangan kecil yang terintegrasi dengan koperasi melalui penciptaan iklim usaha kondusif, meningkatkan kemampuan berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha, pelayanan informasi perdagangan, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat sebagai pencegahan praktek monopoli dan sejenisnya yang merugikan masyarakat, serta melindungi hak-hak konsumen secara wajar.

- 3) Kebijakan operasional pembangunan perdagangan internasional adalah meningkatkan agresivitas ekspor secara terintegrasi, baik melalui diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor maupun melalui peningkatan mutu diplomasi perdagangan dalam rangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Kebijakan lainnya adalah peningkatan perdagangan imbal-beli, kebijakan ke arah penurunan tarif produk kimia dan logam secara bertahap sesuai kesepakatan IMF, kebijakan menghilangkan restriksi kuantitatif terhadap impor barang secara bertahap, pemanfaatan optimal preferensi dalam kerangka multilateral maupun dalam kerjasama komoditi internasional dan kerjasama antarnegara berkembang, pengendalian impor dengan kebijakan yang selaras dengan kesepakatan-kesepakatan internasional, di mana seluruhnya ditujukan untuk mengamankan neraca perdagangan dan menurunkan defisit transaksi berjalan.
- 4) Kebijakan perdagangan internasional lainnya difokuskan untuk melindungi tekanan persaingan dan perilaku dagang tidak wajar (*unfair practices*) yang dilakukan industri luar negeri terhadap industri dalam negeri, melindungi produk Indonesia terhadap tuduhan dumping, serta mendorong investasi sebesar-besarnya guna memanfaatkan peluang relokasi industri, posisi geostrategis Asia Pasifik, dan potensi bahan baku ekspor yang berasal dari bumi Indonesia.
- 5) Kebijakan perdagangan secara umum yang lain adalah mengembangkan sarana penyebaran informasi perdagangan domestik dan perdagangan internasional seluas-luasnya yang menjamin setiap pelaku perdagangan nasional mendapatkan informasi secara simetris atau seimbang, cepat, aktual, dan murah.

D. Kebijakan Operasional Pembangunan Industri dan Pedagang Kecil dan Menengah (IPKM)

1. Mendukung terciptanya struktur ekonomi yang lebih kukuh di mana melibatkan industri dan pedagang kecil dan menengah yang terintegrasi kuat dengan koperasi sekaligus mengarahkan kelompok ini lebih berperan dalam perluasan ekspor dan pengendalian impor.

2. Melakukan inisiasi usaha secara efektif dalam rangka menumbuhkan-kembangkan industri dan pedagang kecil seluas-luasnya agar tercipta peningkatan efisiensi dan produktivitas IPKM, kemandirian usaha, dan pemberdayaan IPKM melalui teknologi modern. Selanjutnya aspek-aspek pendidikan dan pelatihan, permodalan, pemasaran dan kerjasama antara IPKM dengan lembaga Pemerintah, industri dan pedagang skala besar, tetap menjadi sarana pengembangan yang strategis.
3. Pembangunan IPKM dilakukan melalui pendekatan dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), dan dari luar ke dalam. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri skala kecil dan menengah untuk memperbaiki ketimpangan laju pertumbuhan IPKM dengan industri dan perdagangan besar.

E. Kebijakan Operasional Pendukung Enam Program Prioritas Kabinet

1) Di bidang Sandang

- a) Melakukan restrukturisasi mesin-mesin industri tekstil untuk meningkatkan kualitas, produktivitas serta daya saing di pasaran internasional;
- b) Pengembangan industri penunjang dengan tujuan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor.
- c) Memperlancar jalur distribusi bahan baku industri panghasil sandang.

2) Di bidang Pangan

- a) Penguatan terhadap industri penghasil kebutuhan pokok masyarakat antara lain minyak goreng, susu, tepung terigu, mie;
- b) Penguatan terhadap industri penghasil bahan pangan lainnya yang mengalami dampak krisis moneter;
- c) Peningkatan kapasitas produk dan diversifikasi produk industri hasil pertanian seluas-luasnya;
- d) Pemantapan lembaga perdagangan untuk melancarkan arus distribusi kebutuhan pokok secara efisien.

3) Di bidang Papan

- a) Penguatan industri pendukung pembangunan perumahan/- papan, terutama yang mengalami kesulitan sebagai akibat terjadinya krisis moneter.
- b) Memperpendek jalur distribusi bahan bangunan dari produsen ke konsumen.

4) Di bidang Pendidikan

- a) Peningkatan wawasan dan penguasaan teknik-teknik manajemen bagi IPKM melalui pengembangan kemitraan antara IPKM dengan industri dan perdagangan skala besar terutama yang bergerak di bidang agroindustri dan agrobisnis;
- b) Peningkatan kualitas SDM melalui diklat ketrampilan, sekolah kejuruan, dan magang dalam rangka terus meningkatkan kinerja industri;
- c) Peningkatan kemampuan desain produk khususnya bagi industri-industri yang mengandalkan kualitas, mode dan inovasi teknologi sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk-produk ekspor;
- d) Peningkatan kualitas lembaga industri dan perdagangan melalui sarana sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) Peningkatan pengetahuan peraturan-peraturan perdagangan internasional bagi para pelaku perdagangan untuk menghadapi persaingan pasar global.

5) Di bidang Pelayanan Kesehatan

- a) Pengembangan industri farmasi yang didukung oleh industri bahan baku obat dan peralatan kesehatan.
- b) Diversifikasi produk tanaman obat.
- c) Menyederhanakan prosedur impor bahan baku obat.

6) Lapangan Kerja Produktif

- a) Menumbuh-kembangkan IPKM pada kegiatan agroindustri dan agrobisnis bersifat padat karya, baik di sektor perkotaan maupun perdesaan, yang ikut mendorong pertumbuhan industri lanjutan,

penguasaan pasar hortikultura dan buah-sayuran tropis, dan secara bertahap menuju pasar ekspor;

- b) Memberikan fasilitas yang menunjang pertumbuhan dan vitalitas pedagang informal, di lingkungan ekonomi perkotaan maupun perdesaan, dengan tetap mengacu pada rencana induk tata ruang.

F. Dukungan Lintas Sektoral dan Lintas Regional

- a. Pembangunan industri dan perdagangan dicapai melalui peningkatan intensitas kegiatan lintas sektoral dan lintas regional yang terpadu, terutama dalam rangka penyediaan dan penyiapan bahan baku dan prasarana. Pengembangan sektor primer dan sektor jasa diharapkan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan sektor industri dan perdagangan guna menunjang pengembangan industri ke arah tingkat efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi, ikut memperlancar sistem distribusi, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun untuk perdagangan internasional. Dukungan pokok yang diperlukan antara lain meliputi:
 - 1) Penyediaan bahan baku hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan;
 - 2) Pengadaan pasokan energi, pembiayaan industri, pengembangan komunikasi, pengoperasian transportasi, serta pengusahaan lahan;
 - 3) Penyiapan perangkat lunak, antara lain meliputi penyempurnaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, pencegahan pencemaran, perpajakan, pertanahan, tata ruang, perbankan dan otonomi daerah;
 - 4) Penyiapan prasarana lainnya, meliputi antara lain sistem pendidikan dan latihan, kegiatan penelitian dan pengembangan dan sistem informasi.
- b. Untuk mencapai keseimbangan pembangunan secara regional, perlu diupayakan persebaran industri dan perdagangan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama untuk kawasan timur Indonesia, melalui pengembangan sistem insentif, penyederhanaan prosedur perizinan, penyebaran pembangunan sarana dan prasarana penunjang di daerah-daerah yang hendak dibangun, termasuk pemantapan koordinasi antarinstansi terkait di daerah, serta antara pusat dan daerah. Dalam

kaitan ini pembangunan kawasan industri tetap diandalkan sebagai prasarana penunjang dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan. Pembangunan industri terus didorong dan diarahkan untuk mengoptimalkan lahan-lahan industri yang tersedia.

G. Evaluasi Pencapaian Sasaran Repelita VI

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 1996 sebesar 7,82 persen yang berarti lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 8,21 persen. Sektor industri dan industri non migas mengalami kenaikan nilai tambah masing-masing sebesar 11,03 persen dan 12,03 persen pada tahun 1996. Pertumbuhan industri non-migas tersebut lebih rendah dari pada pertumbuhan tahun 1995 sebesar 13,01 persen. Sedangkan untuk sektor perdagangan mengalami kenaikan nilai tambah sebesar 7,63 persen pada tahun 1996, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 7,75 persen. Khusus Perdagangan besar dan eceran pada saat yang sama tumbuh dengan laju 7,79 persen yang berarti sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,71 persen. Besarnya nilai tambah dan kenaikannya secara sektoral dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: PDB Dan Pertumbuhan PDB Secara Sektoral
(1994-1996,1993=100)**

No	Lapangan Usaha	Nilai Tambah (Rp Milyar)				Pertumbuhan (%)				
		1993	1994	1995	1996*)	1997**)	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian, Pernakan, Kehutanan.	58.963,4	59.291,2	61.885,2	63.742,6	64.149,1	0,56	4,38	3,00	0,63
2	Pertambangan dan Penggalian	31.497,3	33.261,6	35.502,2	37.568,6	38.181,5	5,60	6,73	5,82	1,63
3	Industri Pengolahan	73.556,4	82.649,0	91.637,1	102.259,7	108.631,4	12,36	10,88	11,59	6,23
	a. Migas	9.793,8	10.268,8	9.782,4	10.863,9	10.492,2	4,85	(4,73)	11,06	(3,42)
	b. Non Migas	63.762,5	72.380,2	81.854,7	91.395,8	98.139,2	13,52	13,08	10,43	7,37
4	Listrik, gas dan air bersih	3.290,3	3.702,7	4.291,9	4.840,5	5.413,9	12,53	15,91	12,78	11,84
5	Bangunan	22.512,9	25.857,5	29.197,8	32.923,7	35.036,9	14,86	12,92	12,76	6,41
6	Perdagangan Hotel, Restoran	55.297,6	59.504,1	64.230,8	69.372,0	73.160,5	7,61	7,94	8,00	5,46
	a. Perdagangan besar & eceran	44.604,8	47.619,5	51.396,6	55.497,3	58.756,0	6,76	7,93	7,98	5,87
	b. Hotel	2.135,9	2.401,4	2.497,9	2.649,5	2.729,2	12,43	4,01	6,06	3,00
	c. Restoran	8.556,9	9.483,2	10.336,3	11.225,2	11.675,3	10,83	8,99	8,59	4,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.248,9	25.188,6	27.328,6	29.701,1	32.204,1	8,34	8,49	8,68	8,42
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	28.047,8	30.901,0	34.313,0	37.400,5	39.184,0	10,17	11,04	8,99	4,76
9	Jasa-jasa	33.361,4	34.285,1	35.405,8	36.610,2	37.723,8	2,77	3,27	3,40	3,04
	Ekonomi	329.775,8	354.640,8	383.792,3	414.418,9	433.685,2	7,54	8,22	7,89	4,64

Sumber : BPS, diolah.

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

2. Dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,82 persen pada tahun 1996, sektor industri pengolahan nonmigas memberi kontribusi pertumbuhan terhadap LPE tersebut sebesar 2,57 persen atau merupakan 32,86 persen terhadap LPE tersebut, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi pertumbuhan 1,27 persen atau merupakan 16,42 persen terhadap LPE. Pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,54 persen, dimana sektor industri non migas dan perdagangan masing-masing memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,61 persen dan 1,28 persen atau merupakan 34,64 persen dan 16,98 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya dapat diikuti pada tabel berikut:

**Tabel: Peranan Pertumbuhan Sektoral
Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, 1994-1996**

(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	1994	1995	1996*)	1997**)
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	0.10	0.73	0.48	0.10
2	Pertambangan dan Penggalian	0.53	0.63	0.53	0.14
3	Industri Pengolahan	2.76	2.53	2.76	1.53
	a. Migas	0.14	-0.14	0.28	-0.08
	b. Non Migas	2.61	2.67	2.48	1.62
4	Listrik, gas dan air bersih	0.13	0.16	0.14	0.13
5	Bangunan	1.01	0.94	0.97	0.50
6	Perdagangan Hotel, Restoran	1.28	1.33	1.34	0.91
	a. Perdagangan besar & eceran	0.91	1.06	1.06	0.78
	b. Hotel	0.08	0.02	0.04	0.02
	c. Restoran	0.28	0.24	0.23	0.10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.59	0.60	0.61	0.60
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.87	0.96	0.80	0.43
9	Jasa-jasa	0.28	0.32	0.26	0.26
	Ekonomi	7.54	8.22	7.98	4.64

Sumber : BPS, diolah

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

3. Dengan harapan untuk mencapai LPE sebesar 7,1 persen rata-rata per tahun selama Repelita VI, maka dengan fakta empiris selama tiga tahun

Repelita VI, harapan tersebut nampaknya akan dapat direalisasikan. Hal yang sama juga untuk sektor industri. Sedangkan sektor perdagangan harapannya nampak sulit sepenuhnya direalisasikan, *overestimate*. Proyeksi pertumbuhan dan peranan sektor industri dan perdagangan untuk tahun 1994-1996 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Proyeksi Pertumbuhan dan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan selama Repelita VI dan Realisasi 1994-1996

No	Uraian	1994		1995		1996*)		1997	1998	Rep. VI/th
		Pr	Re	Pr	Re	Pr	Re	Pr	Pr	
1	Ekonomi									
	a) Pertumbuhan (%)	7.3	7.54	7.3	8.21	7.1	7.82	7.0	7.0	7.1
	b) Nilai Tambah (Rp Trilyun)	353.85	354.64	379.68	383.77	406.64	413.77	435.10	465.56	
c) Peranan Tdhp PDB (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Industri Pengolahan									
	a) Pertumbuhan (%)	11.5	12.36	10.6	10.81	9.7	11.03	9.9	9.5	10.2
	b) Nilai Tambah (Rp Trilyun)	82.02	82.65	90.71	91.58	99.51	101.68	109.36	119.75	
c) Peranan Tdhp PDB (%)	23.2	23.3	23.9	23.9	24.5	24.6	25.1	25.7		
3	Industri Pengolahan Non Migas									
	a) Pertumbuhan (%)	13	13.52	12	13.01	10.7	12.03	10.4	10.4	11.3
	b) Nilai Tambah (Rp Trilyun)	72.05	72.38	80.70	81.80	89.33	91.64	98.62	108.88	
c) Peranan Tdhp PDB (%)	20.40	20.41	21.30	21.31	22.00	22.15	22.70	23.40		
4	Perdagangan									
	a) Pertumbuhan (%)	9.0	7.61	8.7	7.75	8.2	7.63	8.0	7.5	8.3
	b) Nilai Tambah (Rp Trilyun)	60.27	59.50	65.52	64.11	70.89	69.01	76.56	82.30	
c) Peranan Tdhp PDB (%)	17.03	16.78	17.26	16.71	17.43	16.68	17.60	17.68		

Catatan : *) Angka sangat sementara. Pr (Proyeksi), Re (Realisasi)

Sumber : BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1997, diolah.

- Dilihat dari perkembangan cabang industrinya (dua digit), pada tahun 1996 maka pertumbuhan industri makanan, minuman dan tembakau tetap tumbuh cepat yaitu 17.87 persen, disusul oleh semen, barang galian

bukan logam sebesar 11,73 persen. Cabang industri lainnya tumbuh kurang dari dua digit. Beberapa cabang industri yang mengalami deviasi pertumbuhan tahun 1996 terhadap harapan selama repelita VI yang relatif besar adalah KLUI 31, 33, 34, 38 dan 39. Secara keseluruhan realisasi pertumbuhan industri pengolahan non migas pada tahun 1996 berdeviasi positif sekitar 6,5 persen terhadap harapan selama Repelita VI. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Proyeksi dan Realisasi Pertumbuhan Industri Menurut Cabang
(2 digit, 1994-1996)**

(Dalam persen)

No	Cabang Industri	1994		1995		1996*)		1997**)		1998	Rep. VI
		Pr	Re	Pr	Re	Pr	Re	Pr	Re	Pr	Pr/th
31	Makanan, Minuman dan Tembakau	18.63	18.83	12.17	16.51	9.74	17.16	8.25	14.78	7.32	11.22
32	Tekstil, barang kulit dan Alas kaki.	7.18	6.97	9.11	10.45	8.23	8.71	8.05	(1,71)	8.53	8.22
33	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	4.67	5.93	7.58	3.00	7.23	3.21	7.25	(4.68)	7.82	6.91
34	Kertas dan Barang Cetak	14.86	13.91	16.75	13.53	15.08	6.85	13.77	6.72	13.34	14.76
35	Pupuk, Kimia, Barang dari Karet	11.34	11.10	12.17	11.93	10.55	9.05	10.66	4.77	10.83	11.11
36	Semen, Barang Galian bukan Logam	19.27	19.70	13.19	20.14	11.25	10.98	9.76	4.02	9.33	12.56
37	Logam Dasar Besi dan Baja	5.56	6.49	9.52	18.65	9.74	8.04	11.26	(0.57)	13.34	9.88
38	Alat angkut, Mesin dan Peralatannya	7.07	10.29	14.72	7.73	16.09	4.60	18.48	(1.82)	19.36	15.14
39	Barang Lainnya	11.85	12.41	14.21	8.86	13.77	9.73	15.27	5.31	15.35	14.09
	Industri Pengolahan Non-Migas	13.00	13.52	12.00	13.09	10.7	11.66	10.4	7.38	10.4	11.30

Catatan : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara, Pr (Proyeksi), Re (Realisasi)

Sumber : BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1997, diolah.

5. Dengan pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 12,03 persen pada tahun 1996, kontribusi pertumbuhan terbesar adalah dari cabang industri industri makanan, minuman dan tembakau yang mencakup 8,12

persen. Hal ini berarti 67.5 persen pertumbuhan industri pengolahan non-migas disumbang oleh industri makanan, minuman dan tembakau. Peranan pertumbuhan tersebut berarti meningkat dibanding dengan dua tahun sebelumnya, tahun 1994 sebesar 58,65 persen dan 1995 sebesar 55,96 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Pertumbuhan dan Peranan Pertumbuhan Cabang Industri Terhadap Pertumbuhan Industri Non-Migas, 1994-1997

(Dalam persen)

No	Cabang	Pertumbuhan				Peranan Pertumbuhan			
		1994	1995	1996*)	1997**)	1994	1995	1996*)	1997**)
31	Makanan, Min. dan tembakau	18.83	16.51	17.16	14.78	7.93	7.28	7.80	7.05
32	Tekstil, brg kulit & alas kaki	6.97	10.45	8.71	(1.71)	0.74	1.05	0.86	(0.16)
33	Brg kayu & hsl hut. lainnya	5.93	3.00	3.21	(4.68)	0.49	0.23	0.22	(0.30)
34	Kertas & brg cetakan	13.91	13.53	6.85	6.72	0.58	0.56	0.29	0.27
35	Pupuk, kimia, brg dr karet	11.10	11.93	9.05	4.77	1.48	1.55	1.17	0.60
36	Semen, brg galian bukan logam	19.70	20.14	10.98	4.01	0.61	0.66	0.38	0.14
37	Logam dsr besi dan baja	6.49	18.65	8.04	(0.58)	0.24	0.64	0.29	(0.02)
38	Alat angkut, msn & peralatannya	9.68	7.73	4.60	(1.82)	1.38	1.06	0.60	(0.22)
39	Barang lainnya	12.42	8.86	9.73	5.31	0.07	0.05	0.06	0.03
	Ind. Pengolahan nonmigas	13.52	13.09	11.66	7.38	13.52	13.09	11.66	7.38

Sumber : BPS, *Pendapatan Nasional Indonesia, 1997, diolah.*

Catatan : *) Angka sementara.

**) Angka sangat sementara Pr (Proyeksi), Re (Realisasi)

6. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1994 dan 1995 masing-masing sebesar 7,51 persen dan 8,21 persen. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 1995 pada umumnya mencapai lebih dari 8 persen. Beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan lebih kecil dari 8 persen

adalah: Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali dan Maluku. Sementara kegiatan perekonomian nasional masih didominasi oleh kegiatan ekonomi di Jawa yang mencapai hampir 60 persen dan Sumatera yang mencapai sekitar 21 persen. Pertumbuhan ekonomi daerah dan peranan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Pertumbuhan dan Peranan Ekonomi Daerah
Terhadap Perekonomian Nasional, 1994-1995**

Dalam persen

No	Propinsi	Pertumbuhan		Peranan Daerah		
		1994	1995	1993	1994	1995
1	Aceh	1.31	1.13	3.36	3.00	2.93
2	Sumatera Utara	9.47	9.33	5.63	5.79	5.63
3	Sumatera Barat	7.45	8.34	1.86	1.93	1.85
4	Riau	4.19	4.66	5.33	4.87	4.86
5	Jambi	8.17	8.23	0.76	0.78	0.79
6	Sumatera Selatan	7.26	8.95	3.32	3.22	3.32
7	Bengkulu	6.83	8.16	0.43	0.48	0.48
8	Lampung	7.13	10.42	1.67	1.74	1.83
	Sumatera	6.22	6.94	22.37	21.80	21.68
9	DKI Jakarta	8.61	9.25	15.79	15.69	15.93
10	Jawa Barat	7.04	7.9	16.28	16.66	16.72
11	Jawa Tengah	6.96	7.65	10.50	10.49	10.49
12	DI Yogyakarta	8.11	8.09	1.25	1.30	1.28
13	Jawa Timur	7.23	8.19	15.20	15.26	15.10
	Jawa	7.52	8.30	59.02	59.41	59.52
14	Kalimantan Barat	7.54	9.5	1.59	1.62	1.63
15	Kalimantan Tengah	7.92	9.03	0.95	0.98	0.99
16	Kalimantan Selatan	8.63	9.11	1.41	1.41	1.40
17	Kalimantan Timur	10.43	4.01	4.95	5.12	4.96
	Kalimantan	9.36	6.30	8.90	9.12	8.98
18	Sulawesi Utara	7.53	8.41	0.87	0.85	0.87
19	Sulawesi Tengah	7.39	8.10	0.54	0.56	0.58
20	Sulawesi Selatan	7.67	8.02	2.32	2.33	2.35
21	Sulawesi Tenggara	6.57	7.14	0.40	0.40	0.42
	Sulawesi	7.50	8.03	4.13	4.15	4.21
22	Bali	7.51	7.93	1.76	1.73	1.69
23	Nusa Tenggara Barat	7.27	8.03	0.79	0.79	0.79
24	Nusa Tenggara Timur	8.55	8.86	0.65	0.66	0.66

Lnajutan

25	Maluku	6.52	5.49	0.76	0.74	0.71
26	Irian Jaya	7.53	19.98	1.47	1.43	1.60
27	Timor Timur	9.95	9.43	0.16	0.16	0.16
	Subtotal	7.54	10.94	5.58	5.52	5.61
	PDRB	7.39	7.96	100.00	100.00	100.00
	INDONESIA	7.54	8.21	-	-	-

Sumber : PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, BPS, 1996, diolah.

Catatan : Perbedaan antara pertumbuhan PDRB dengan PDB antara lain disebabkan oleh perbedaan cakupan dan diskrepansi statistik.

7. Dapat diamati bahwa perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan timur Indonesia (13 propinsi) sedikit lebih cepat dari pada perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan barat Indonesia, sehingga sedikit menggeser peran ekonomi daerah dari kawasan barat ke kawasan timur Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Pertumbuhan dan Peranan Ekonomi Kawasan Timur dan Barat Terhadap Perekonomian Nasional/PDRB (1994-1995)

Dalam persen

No	Kawasan	Pertumbuhan		Peranan Kawasan		
		1994	1995	1993	1994	1995
1	Kawasan Timur Indonesia	8.49	8.07	16.85	17.06	17.11
2	Kawasan Barat Indonesia	7.17	7.93	83.15	82.94	82.89
3	PDRB Indonesia	7.39	7.96	100.00	100.00	100.00
4	PDB Nasional	7.54	8.21	-	-	-

Sumber : PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, BPS, 1996, diolah

8. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan pada tahun 1994 dan 1995 secara nasional masing-masing sebesar 12,36 persen dan 10,81 persen sedangkan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada periode yang sama masing-masing sebesar 13,52 persen

dan 13,01 persen. Sementara pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 7,61 persen dan 7,75 persen. Tabel selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Pertumbuhan Industri dan Perdagangan Menurut Propinsi
1994-1995**

Dalam persen

No	Propinsi	Pertum. Industri		Pertum. Ind.Nonmigas		Pertum. Perdag.	
		1994	1995	1994	1995	1994	1995
1	Aceh	3.14	-3.58	10.48	10.05	10.20	9.16
2	Sumatera Utara	7.74	9.23	7.86	9.21	20.15	10.33
3	Sumatera Barat	10.29	10.64	10.29	10.64	7.48	6.49
4	Riau	6.16	13.21	14.83	14.80	9.07	8.97
5	Jambi	13.24	13.68	13.24	13.68	12.10	9.89
6	Sumatera Selatan	8.23	9.60	12.20	12.55	9.09	11.38
7	Bengkulu	13.06	7.77	13.06	7.77	13.58	6.83
8	Lampung	8.17	9.05	8.17	9.05	7.77	4.23
	Sumatera	6.91	7.61	10.18	10.93	12.86	9.26
9	DKI Jakarta	8.80	10.85	8.80	10.85	8.84	11.13
10	Jawa Barat	13.76	14.70	13.73	14.79	8.85	7.23
11	Jawa Tengah	10.63	9.77	13.75	12.07	11.44	11.24
12	DI Yogyakarta	17.69	5.50	17.69	5.50	8.44	8.46
13	Jawa Timur	12.99	13.08	12.99	13.08	8.92	10.09
	Jawa	11.85	12.32	12.44	12.86	9.31	9.84
14	Kalimantan Barat	8.91	7.89	8.91	7.89	7.15	9.78
15	Kalimantan Tengah	5.12	4.01	5.12	4.01	7.92	8.98
16	Kalimantan Selatan	17.72	12.38	17.72	12.38	10.81	5.36
17	Kalimantan Timur	12.38	-4.11	6.31	7.23	8.56	7.74
	Kalimantan	12.13	-0.19	9.35	8.29	8.53	7.98
18	Sulawesi Utara	9.31	10.12	9.31	10.12	11.36	12.11
19	Sulawesi Tengah	6.64	9.39	6.64	9.39	8.88	8.58
20	Sulawesi Selatan	10.30	8.05	10.30	8.05	6.90	8.15
21	Sulawesi Tenggara	23.01	37.98	23.01	37.98	5.40	7.33
	Sulawesi	10.43	10.37	10.43	10.37	7.73	8.80
22	Bali	15.26	12.45	15.26	12.45	10.06	9.00

Lanjutan

23	Nusa Tenggara Barat	7.64	6.61	7.64	6.61	7.93	14.95
24	Nusa Tenggara Timur	12.81	6.50	12.81	6.50	2.81	14.05
25	Maluku	4.24	4.65	4.24	4.65	12.43	12.65
26	Irian Jaya	8.28	9.13	8.41	9.27	6.94	6.98
27	Timor Timur	15.97	21.44	15.97	21.44	4.42	28.86
	Subtotal	9.28	8.50	9.30	8.53	9.14	10.81
	PDRB sektor	10.84	10.00	11.78	12.13	9.77	9.64
	PDB sektor	12.36	10.81	13.52	13.01	7.61	7.75

Sumber: PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, BPS, 1996, diolah

9. Secara sektoral regional pertumbuhan sektor industri di pulau Jawa masih melaju lebih cepat dari pada pulau-pulau lainnya, sehingga peran sektor industri regional terhadap sektor industri nasional masih tetap bertumpu di kawasan barat Indonesia.

**Tabel: Pertumbuhan dan Peranan Sektoral Terhadap PDRB
1993-1995**

Dalam persen

No	Kawasan	Pertum. Industri			Pert. Ind. Non.Migas			Pertum. Perdag		
		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
1	KBI	-	10.76	11.30	-	12.06	12.51	-	9.99	9.70
2	KTI	-	11.41	1.76	-	9.18	8.50	-	8.22	9.17
Peran Sektoral Thd PDRB Ekonomi										
		Industri			Industri Non Migas			Pedagangan		
		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
1	KBI	23.50	24,81	25.58	21.24	22.87	23.78	18.38	18.86	18.79
2	KTI	18.15	18.07	17.17	11.32	11.34	11.21	13.00	12.84	12.77
	Total	22.60	23.66	24.14	19.57	20.91	21.63	17.47	17.83	17.76
Peran Sektoral Kawasan Thp Total PDRB Sektoral Indonesia										
		Industri			Industri Non-Migas			Perdagangan		
1	KBI	86.47	86.97	87.83	90.25	90.75	91.13	87.47	87.71	87.70
2	KTI	13.53	13.03	12.17	9.75	9.25	8.87	12.53	12.29	12.30
3	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia, BPS, 1996, diolah.

10. Dari sisi permintaan maka perekonomian nasional masih tetap bertumpu pada pasar domestik dimana pengeluaran rumah tangga merupakan 55.65 persen terhadap PDB pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 58.32 persen terhadap total pengeluaran seluruh unit pelaku ekonomi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : Peranan Permintaan Domestik dan Luar Negeri
Terhadap PDB**

Dalam persen

No	Uraian	1993	1994	1995	1996
1	Permintaan Domestik	97.25	98.02	99.22	98.67
	a. Konsumsi RT	55.65	57.44	57.82	58.32
	b. Pengeluaran Pemerintah	9.02	8.11	8.09	7.69
	c. Pembentukan modal tetap domestik bruto (termasuk perubahan stok)	32.57	32.46	33.32	32.66
2	Sektor Luar Negeri Bersih	2.75	1.98	0.78	1.33
	a. Ekspor barang dan jasa	26.52	26.02	26.02	26.22
	b. Impor barang dan jasa	23.77	24.04	25.23	24.89
	PDB	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1997, diolah.

11. Pertumbuhan permintaan domestik pada tahun 1996 sebesar 8,30 persen, lebih rendah dibanding dengan tahun 1995 sebesar 10,21 persen. Sementara sektor luar negeri, mengalami perbaikan sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan PDB menjadi lebih baik. Pada tahun 1995 kontribusi sektor luar negeri terhadap pertumbuhan PDB sebesar -1,84 persen, dan pada tahun 1996 membaik menjadi -0,5 persen.

Tabel: Pertumbuhan dan Peranan Permintaan Domestik Serta Luar Negeri

Dalam persen

No	Uraian	Pertumbuhan			Kontribusi Pertumbuhan		
		1994	1995	1996	1994	1995	1996
1	Permintaan Domestik	8.85	10.21	8.30	8.61	10.05	8.32
	a. Konsumsi RT	9.22	7.66	12.19	5.13	4.33	6.86
	b. Pengeluaran Pemerintah	2.31	3.39	1.75	0.21	0.29	0.14
	c. Pembentukan modal tetap domestik bruto (termasuk perubahan stok)	10.03	16.29	3.68	3.27	5.43	1.32
2	Sektor Luar Negeri Bersih	-38.76	-117.34	199.48	-1.07	-1.84	-0.50
	a. Ekspor barang dan jasa	8.98	8.05	7.85	2.38	2.16	2.11
	b. Impor barang dan jasa	14.50	15.81	9.63	3.45	4.00	2.61
3	PDB riil	7.54	8.21	7.82	7.54	8.21	7.82

Sumber : BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1997, diolah.

12. Laju kenaikan total ekspor pada tahun 1996/1997 (April-Februari) sebesar 10,27 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, yaitu naik dari US \$ 42,53 milyar menjadi US \$ 46,89 milyar. Besarnya total ekspor pada tahun 1996/1997 tersebut sebagian besar tetap disumbangkan oleh ekspor hasil industri yang merupakan 64,14 persen terhadap total ekspor, atau 84,33 persen terhadap ekspor non-migas. Ekspor hasil industri pada tahun 1996/1997 (April-Februari) sebesar US \$ 30,08 milyar atau meningkat 8,91 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara sektor pertambangan, pada periode yang sama, meningkat 9,52 persen, maka sektor pertanian mengalami penurunan ekspor -1,63 persen.
13. Apabila dibandingkan dengan tahun pertama dan kedua Repelita VI, 1994/1995 dan 1995/1996, maka kecenderungan total ekspornya menurun yaitu dari 14,58 persen pada tahun 1994/1995 menjadi 11,3 persen pada tahun 1995/1996 dan 10,27 persen pada tahun 1996/1997 (April-Februari). Dengan peran sektor industri yang besar, maka

penurunan laju perkembangan ekspor hasil industri akan berpengaruh kuat terhadap penurunan ekspor secara keseluruhan. Laju perkembangan ekspor hasil industri menurun dari 15,49 persen pada tahun 1994/95 menjadi 12,28 persen dan 8,91 persen pada tahun 1995/1996 dan 1996/1997 (April-Februari).

14. Sementara itu impor total pada tahun 1996/1997 (April-Februari) mengalami kenaikan 6,38 persen dibanding dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, yaitu meningkat dari US\$ 37, 74 milyar menjadi US \$ 40,15 milyar. Kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari pada kenaikan pada tahun 1995/1996 dan 1994/1995 sebesar 21,64 persen dan 17,29 persen. Melambatnya total impor tersebut akibat dari rendahnya impor nonmigas yang hanya meningkat sebesar 4,98 persen pada tahun 1996/1997 (April-Februari) dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam pada itu impor hasil-hasil industri pada periode yang sama meningkat sebesar 3,61 persen, sedangkan pada tahun 1995/1996 dan 1994/1995 meningkat sebesar 23,20 persen dan 15,76 persen.
15. Perkembangan impor yang lambat pada tahun 1996/1997 telah ikut membentuk surplus neraca perdagangan yang lebih besar, meskipun surplus tersebut masih dikontribusikan oleh migas, sedangkan nonmigas masih mengalami defisit. Sektor industri meskipun mengalami defisit tetapi dengan jumlah yang menurun. Selengkapnya posisi neraca perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Perkembangan Surplus Neraca Perdagangan
(1993/1994 - 1997/1998)
(April – Maret)**

Dalam juta US \$

No	Uraian	1993/94	1994/95	1995/96	1996/1997	1997/1998
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	TOTAL	7,469.7	7,775.1	5,180.5	7,006.4	13,140.6
B	MIGAS	7,203.9	7,442.5	7,605.3	8,314.1	6,415.0
	1 Minyak mentah dan Hasil Minyak	3,281.2	3,684.7	3,493.9	3,638.8	2,013.8
	2 Gas alam/LPG	3,922.6	3,757.8	4,111.4	4,675.2	4,401.2
C	NONMIGAS	265.8	332.6	-2,424.8	-1,307.6	6,725.6
	1 Pertanian	534.1	431.8	362.9	-186.9	680.3
	2 Petambangan	1258.1	1,724.0	2,238.0	2,636.4	2,505.8
	3 Industri	-1523.4	-1,823.8	-5,169.0	-3,788.1	3,056.4
	4 Lainnya	-2.9	0.5	-6.8	31.0	483.1

Sumber : BPS diolah

Catatan : *) Realisasi sampai dengan Pebruari 1998

16. Perkembangan ekspor dan impor selama 3 tahun pelaksanaan Repelita VI, nampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Total ekspor yang diharapkan dapat meningkat sebesar 13,7 persen per tahun selama Repelita VI, tetapi pada tahun kedua dan ketiga (Apr-Feb. 1996/1997) masing-masing naik sebesar 11,3 persen dan 10,27 persen (dibanding dengan periode yang sama), yang berarti dibawah harapan, sedangkan pada tahun pertama pelaksanaan Repelita VI sasaran sebesar 12,8 persen dapat dilampaui, yaitu naik 14,58 persen dibanding dengan tahun terakhir Pelita V. Ekspor migas yang diperkirakan hanya naik rata-rata per tahun selama Repelita VI sebesar 0,8 persen, ternyata mengalami kenaikan yang relatif tinggi. Bahkan untuk tahun ketiga Repelita VI yang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif 0,4 persen ternyata realisasinya naik 16,06 persen pada periode April-Februari 1996/1997, dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor industri yang berperan besar terhadap total ekspor mengalami pertumbuhan jauh dari yang disasarkan sebesar 17,8 persen per tahun selama Repelita VI.
17. Impor yang diharapkan dapat mengalami kenaikan sebesar 14,3 persen per tahun selama Repelita VI, ternyata pada tahun 1994/1995 dan 1995/1996 ternyata naik masing-masing sebesar 17,29 persen dan 21,64 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yang berarti melebihi dari apa yang disasarkan, baru pada tahun 1996/1997 (Apr-Feb), impornya bisa ditekan bahkan sampai dibawah sasaran, yaitu naik 6,38 persen, dibanding dengan sasaran pada tahun 1996/1997 sebesar 14,7 persen. Proyeksi dan realisasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Proyeksi dan Realisasi Perkembangan Neraca Perdagangan
(1994/1995 s/d Apr-Feb.1996/1997)**

Dalam persen

No	Uraian	1994/95		1995/96		1996/97*)		97/98	98/99	Rep. VI/th
		Pr	Re	Pr	Re	Pr	Re	Pr	Pr	Pr
I	Total Ekspor	12,8	14,58	13,6	11,30	13,3	10,27	14,0	14,7	13,7
A	Migas	2,0	6,58	3,1	5,83	-0,4	16,06	-0,1	-0,7	0,8
B	NonMigas	16,3	17,39	16,5	13,16	16,7	8,56	17,0	17,5	16,8
	1. Pertanian	6,4	25,65	6,6	4,10	6,8	-1,63	7,1	7,3	6,8
	2. Industri	17,5	15,49	17,5	12,28	17,6	8,91	17,9	18,4	17,8
	3. Pertambangan	14,6	33,71	15,2	37,24	15,8	9,52	15,1	14,4	15,0
II	Total Impor	13,8	17,29	13,9	21,64	14,7	6,38	13,9	15,2	14,3
A	Migas	7,1	17,07	6,2	16,15	11,7	24,24	2,2	12,6	7,9
B	NonMigas	14,6	17,31	14,8	22,10	15,0	4,98	15,2	15,4	15,0
III	Neraca Perdagangan (Surplus)	9,5	4,09	12,3	-33,37	8,0	40,88	14,3	12,8	11,4

Catatan : Pr=Proyeksi, Re = Realisasi,

*) April-Februari 1996/97 dibanding dengan April-Februari 1995/96

Sumber : Proyeksi: Buku Repelita VI, Sektor Perdagangan dan Neraca Pembayaran Internasional.

Realisasi : Pusdata, diolah.

18. Tingkat inflasi, yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK), pada tahun terakhir Pelita V, (1993), sebesar 9,77 persen dan terus menurun menjadi 9,24 persen, 7,33 persen dan 6,47 persen berturut-turut pada tahun 1994, 1995 dan 1996 sedangkan pada tahun 1997 naik menjadi 11,05 persen. Dilihat dari inflasi menurut kelompok barang maka pada tahun 1996, kelompok makanan mengalami penurunan inflasi yang tajam dari 13,93 persen pada tahun 1994 dan 10,23 persen pada tahun 1995 menjadi 6,12 persen pada tahun 1996 serta pada tahun 1997 inflasi naik menjadi 18,45 persen. Untuk kelompok barang perumahan, inflasinya dapat terus ditekan dari 9,09 persen pada tahun 1994 menjadi 5,67 persen pada tahun 1995 dan 4,72 persen pada tahun 1996 sedangkan

pada tahun 1997 inflasi menjadi 6,08 persen. Inflasi kelompok sandang selama tiga tahun terakhir, 1994, 1995, 1996, dan 1997 berturut-turut sebesar 6,08 persen, 5,18 persen, 5,77 persen dan 7,67 persen. Sedangkan inflasi kelompok aneka barang dan jasa justru mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir yaitu dari 4,89 persen pada tahun 1994 menjadi 6,70 persen dan 9,69 persen pada tahun 1995 dan 1996 serta pada tahun 1997 menjadi 8,11 persen. Melihat perkembangan inflasi tersebut, maka sasaran inflasi sebesar 6 persen per tahun selama Repelita VI terlalu berat untuk dapat dicapai. Namun melihat perkembangan inflasi tersebut yang terus bergerak menurun merupakan prestasi yang luar biasa. Perkembangan realisasi inflasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
1993-1996**

Dalam persen

Tahun	Makanan	Perumahan	Sandang	Aneka Barang dan Jasa	IHK
1993	5,11	15,48	7,97	9,89	9,77
1994	13,94	9,09	6,08	4,89	9,24
1995	13,32	5,67	6,50	7,00	8,64
1996	6,12	4,72	5,77	9,69	6,47
1997	18,45	6,08	7,67	8,11	11,05

Sumber : Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, 1996.

19. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri yang disetujui oleh Pemerintah sebesar Rp 59.217,7 milyar pada tahun 1996 yang berarti meningkat hampir dua kalinya dibanding dengan nilai PMDN pada tahun 1994 sebesar Rp 31.921,7 milyar. Cabang industri yang terus mengalami kenaikan PMDN selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI adalah industri makanan, kertas, logam dasar dan barang logam. Secara kumulatif selama tahun 1994-1996 PMDN sektor industri mencapai Rp 134.48 trilyun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Perkembangan PMDN sektor Industri
(1994-1996)**

Dalam milyar Rupiah

No	Sektor/Cabang	1994	Prop	1995 %	Prop %	1996 %	Prop %	Kenaikan %		1996	Kumulatif 1994- 1996
								1994	1995		
	Sektor Industri	31921.7	100	43341.8	100	59217.7	100	32.83	35.78	36.63	134481.3
1	Ind. Makanan	4044.8	12.7	5160.1	11.9	13748.3	23.2	95.11	27.57	166.43	22953.2
2	Ind. Tekstil	5518.3	17.3	7176.6	16.6	3365.8	5.68	55.93	30.05	-53.10	16060.7
3	Ind. Kayu	1171.2	3.67	2009.8	4.64	1128.9	1.91	-14.74	71.60	-43.83	4309.9
4	Ind. Kertas	3749.3	11.7	6032.6	13.9	12763.9	21.6	69.75	60.90	111.58	22545.8
5	Ind. Kimia & Farmasi	5377.8	16.8	9021.6	20.8	13392.7	22.6	-30.76	67.76	48.45	27792.1
6	Ind. Mineral Nonlogam	8546.9	26.8	9088.9	21	7964.8	13.5	58.30	6.34	-12.37	25600.6
7	Ind. Logam dasar	1663.9	5.21	2380.5	5.49	4460.7	7.53	791.22	43.07	87.39	8505.1
8	Ind. Barang Logam	1783.5	5.59	2338.5	5.4	2375.9	4.01	22.09	31.12	1.60	6497.9
9	Ind Lainnya	66	0.21	133.3	0.31	16.7	0.03	176.15	101.97	-87.47	216

Catatan : Prop=proporsi

Sumber : BKPM, diolah.

20. Penanaman modal Asing (PMA) sektor industri yang disetujui oleh Pemerintah sebesar US\$ 18.738,8 juta pada tahun 1994 yang berarti meningkat lebih dari lima kalinya dibanding dengan nilai PMA pada tahun 1993 sebesar US \$ 3.422,8 juta. Dan pada tahun 1996 PMA masih tetap tinggi meskipun lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. Cabang industri yang terus mengalami kenaikan PMA selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI adalah industri barang logam. Cabang industri yang mengalami lonjakan investasi asing pada tahun 1994 yang luar biasa adalah industri kertas, logam dasar, makanan, mineral nonlogam dan kimia. Dan cabang industri yang berperan besar dalam PMA pada tahun 1996 adalah industri kimia, barang logam dan kertas. Secara kumulatif selama tahun 1994-1996 PMA sektor industri mencapai

US\$ 61.903,1 juta, atau Rp 142,07 trilyun . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Perkembangan PMA sektor Industri
(1994-1996)**

US \$ juta

No	SEKTOR	1994	Prop %	1995	Prop %	1996	Prop %	Kenaikan %			kumulatif 94-96
								1994	1995	1996	
	SEKTOR SEKUNDER	18738.8	100	26892.1	100	16272.2	100	447.47	43.51	-39.49	61903.1
1	Ind. Makanan	1234.8	6.59	1331.8	4.95	691.4	4.25	775.12	7.86	-48.09	3258.00
2	Ind. Tekstil	396.4	2.12	471.1	1.75	514.6	3.16	-5.48	18.84	9.23	1382.10
3	Ind. Kayu	68.1	0.36	263	0.98	101.1	0.62	35.66	286.20	-61.56	432.20
4	Ind. Kertas	5120.1	27.3	2540.5	9.45	2907.3	17.9	2439.73	-50.38	14.44	10567.90
5	Ind. Kimia & Farmasi	7743.2	41.3	19404.4	72.2	7404.6	45.5	554.65	150.60	-61.84	34552.20
6	Ind. Mineral Nonlogam	631.9	3.37	289.3	1.08	789.8	4.85	546.11	-54.22	173.00	1711.00
7	Ind. Logam dasar	2081.6	11.1	291.7	1.08	850.9	5.23	1019.74	-85.99	191.70	3224.20
8	Ind. Barang Logam	1423.1	7.59	2258.1	8.4	2938.6	18.1	27.75	58.67	30.14	6619.80
9	Ind Lainnya	39.6	0.21	42.2	0.16	73.9	0.45	32.00	6.57	75.12	155.70

Catatan : Pro=proporsi. US \$ 1 = Rp 2.200 (1994), Rp 2308 (1995) dan Rp 2383 (1996).

Sumber : BKPM, diolah.

21. Berdasarkan data empiris realisasi penanaman modal yang disetujui sekitar 46 persen untuk PMDN dan 47 persen untuk PMA (posisi s/d Nopember 1996). Dengan demikian apabila angka realisasi tersebut berlaku untuk sektor industri maka realisasi secara kumulatif untuk PMDN sebesar Rp 61.861,4 milyar sedangkan realisasi untuk PMA sebesar Rp 66,77 trilyun. Sehingga untuk PMDN dan PMA diperkirakan realisasinya secara kumulatif , 1994-1996, sebesar Rp 128,63 trilyun, yang berarti merupakan 71,46 persen terhadap penanaman modal sektor industri yang diharapkan sebesar Rp 180 trilyun selama Repelita VI.

22. Penanaman modal di sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) yang disetujui secara kumulatif selama 1994-1996 (15 Nopember) sebesar Rp 13.429,5 milyar untuk PMDN dan US \$ 2.571,6 juta, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Perkembangan PMDN dan PMA Sektor Perdagangan
1994-s/d 15 November 1996**

URAIAN	1994	1995	1996 *	Kenaikan (%)			Kumulatif 1994-96
				1994	1995	1996	
PMDN (Rp milyar)							
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	4344.6	3944.9	5140	36.77	-9.20	30.29	13429.50
1. Perdagangan	2.7	152.4	127.9	-97.85	5544.44	-16.08	283.00
2. Hotel dan restoran	4341.9	3792.5	5012.1	42.30	-12.65	32.16	13146.50
PMA (US \$ juta)							
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	430.3	1029.3	1112	-60.43	139.21	8.03	2571.60
1. Perdagangan	86.7	30.5	45.2	-87.49	-64.82	48.20	162.40
2. Hotel dan restoran	343.6	998.8	1066.8	-12.88	190.69	6.81	2409.20

Catatan : *) s/d 15 November 1996.

Sumber : BKPM, diolah.

23. Sejalan dengan perubahan struktur produk nasional, tenaga kerja yang diserap dalam kegiatan ekonomi juga mengalami perubahan struktur yang mantap ke arah sektor industri dan perdagangan. Pada tahun 1993 dari 79,2 juta penduduk yang bekerja maka 8,78 juta orang diantaranya bekerja disektor industri dan 12,51 juta orang bekerja di sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran), yang berarti ke dua sektor tersebut masing-masing menyerap 11,09 persen dan 15,79 persen, sedangkan pada tahun 1996 dari penduduk yang bekerja sebanyak 85,70 juta orang maka 10,77 juta orang diantaranya berada di sektor industri dan 16,10 juta orang bekerja di sektor perdagangan, atau masing-masing menyerap 12,57 persen dan 18,79 persen.
24. Apabila dibandingkan dengan rencana penyerapan tenaga kerja di seluruh kegiatan ekonomi yang berjumlah 11,91 juta orang, maka sampai

dengan tahun ke tiga Repelita VI tercatat penambahan penyerapan tenaga kerja sejumlah 6,5 juta orang atau merupakan 54,6 persen. Sementara disektor industri selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI telah menampung tambahan tenaga kerja sebesar 1,99 juta orang yang berarti merupakan 61,42 persen dari rencana sebesar 3,24 juta orang. Dengan demikian diharapkan sasaran pada akhir Repelita VI, dua tahun mendatang, tersebut akan dapat tercapai. Sedangkan di sektor perdagangan adalah sangat mengejutkan, dimana selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI telah tercatat penambahan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,59 juta orang yang berarti telah jauh melampaui harapan sebanyak 2,33 juta orang selama Repelita VI.

25. Dari sisi lain, jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja pada tahun 1993 dan 1996 masing-masing sebesar 81,45 juta orang dan 90,11 juta orang atau naik 8,66 juta, dimana yang dapat diserap dalam kegiatan ekonomi berjumlah 6,5 juta orang atau terjadi penambahan pengangguran selama periode tersebut sebanyak 2,16 juta orang, atau secara akumulasi total pengangguran pada tahun 1996 adalah 4,41 juta orang, yang berarti 5,15 persen terhadap penduduk yang bekerja. Keadaan angkatan kerja secara sektoral pada tahun 1993 dan 1996 dapat disimak pada tabel berikut:
26. Secara regional perkembangan angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di kawasan timur lebih cepat dari pada di kawasan barat baik untuk sektor industri maupun perdagangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Perkembangan Angkatan Kerja Dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kawasan, 1994 - 1996 (%/Th)

Dalam persen

Kawasan	Angk. Kerja	Bekerja	Pertanian	Industri	Perdagangan
KBI	3,17	2,40	-3,02	6,76	8,37
KTI	4,56	3,83	1,37	9,14	11,50
Indonesia	3,43	2,66	-2,00	7,04	8,78

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1993 dan 1994.

Dengan laju perkembangan tersebut maka terjadi perubahan struktur antar kawasan barat dan timur, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Perkembangan Struktur Angkatan Kerja Dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kawasan, 1993 Dan 1996

Dalam persen

Kawasan	Angk. Kerja		Bekerja		Pertanian		Industri		Perdagangan	
	1993	1996	1993	1996	1993	1996	1993	1996	1993	1996
KBI	81,95	81,35	81,88	81,26	77,48	75,08	88,56	87,87	87,15	86,17
KTI	18,05	18,65	18,12	18,74	22,52	24,92	11,44	12,13	12,85	13,83
Indonesi a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1993 dan 1996, diolah.